



Kontribusi BPRS Bhakti Sumekar Perseroda terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Sumenep

*Farisul Haq**

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al-Amien Prenduan Sumenep

Abstrak	Informasi Artikel
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS Bhakti Sumekar Perseroda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan BPRS Bhakti Sumekar tahun 2024, regulasi terkait, dan literatur pendukung. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan berbasis prinsip syariah kepada sektor riil serta sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2024, BPRS Bhakti Sumekar menghimpun Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 829,33 miliar, menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 651,57 miliar, mencatat laba bersih sebesar Rp 11,07 miliar, dan menyetor dividen PAD sebesar Rp 5,59 miliar. Selain itu, BPRS juga menyalurkan dana CSR sebesar Rp 868 juta untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, dan dakwah. Temuan ini menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar berperan sebagai instrumen keuangan daerah yang mendukung penguatan sektor riil, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat Sumenep.	Kata Kunci : BPRS, Keuangan Syariah, BUMD, PAD, Pembangunan Ekonomi Daerah
Abstract This study aims to analyze the role of Bank Perekonomian Rakyat Syariah or BPRS Bhakti Sumekar Perseroda in supporting regional economic development in Sumenep Regency. This research uses a qualitative descriptive approach based on secondary data from the	Keywords : BPRS, Islamic Finance, Regionally Owned Enterprise, Local

2024 financial report of BPRS Bhakti Sumekar, relevant regulations, and supporting literature. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that BPRS Bhakti Sumekar plays a strategic role as an Islamic financial institution that distributes sharia-based financing to the real sector and as a regionally owned enterprise that contributes to Local Original Revenue. In 2024, BPRS Bhakti Sumekar collected IDR 829.33 billion in third-party funds, distributed IDR 651.57 billion in financing, recorded IDR 11.07 billion in net profit, and paid IDR 5.59 billion in regional dividends. In addition, the bank allocated IDR 868 million in CSR funds to support education, health, economic empowerment, social assistance, and religious outreach programs. These findings show that BPRS Bhakti Sumekar serves as a regional financial instrument that supports the real sector, regional revenue, and community welfare in Sumenep Regency.

Original Revenue,
Regional
Economic
Development

*Corresponding Author: Farisul Haq, farisulhaq.id@gmail.com

Academic Editor:
Firstname Lastname

Received: date
Revised: date
Accepted: date
Published: date

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memegang peranan vital sebagai perantara (*financial intermediaries*) yang mengalokasikan dana dari unit surplus kepada unit defisit untuk menggerakkan roda perekonomian (Jamal, 2014). Dalam konteks pembangunan, kinerja sektor keuangan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Perbankan syariah muncul sebagai instrumen yang unggul karena menerapkan sistem berbasis aset dan produksi (*asset & production based system*) melalui skema bagi hasil seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pola ini memastikan sektor keuangan dan sektor riil bergerak selaras, sehingga kontribusinya lebih nyata dalam meningkatkan produktivitas masyarakat serta menekan angka kemiskinan (Ali, 2010).

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan luas untuk mengelola sumber daya dan keuangan secara mandiri guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu strategi utamanya adalah melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Merujuk pada pemikiran

Siahaan (2012), BUMD tidak hanya berfungsi sebagai penyumbang dividen bagi PAD, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi makro yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pemerintah Kabupaten Sumenep merespons tantangan pembangunan ekonomi ini dengan menghadirkan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Perseroda. Lembaga ini didirikan untuk mendayagunakan potensi ekonomi lokal Sumenep agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara merata melalui prinsip ekonomi syariah.

Namun demikian, sejauh ini kajian literatur masih banyak yang memisahkan antara fungsi perbankan syariah sebagai lembaga profit dengan fungsi BUMD sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam pelayanan publik. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah peran ganda BPRS Bhakti Sumekar sebagai lembaga keuangan syariah sekaligus instrumen BUMD dalam satu kesatuan analisis. Gap penelitian ini menjadi penting untuk digali guna melihat sejauh mana integrasi nilai syariah dan misi pembangunan daerah dapat berjalan beriringan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis kontribusi strategis BPRS Bhakti Sumekar Perseroda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Sumenep.

LANDASAN TEORI

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah yang terhindar dari riba, suap dan korupsi. Tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah melaksanakan perintah Allah di bidang ekonomi dan keuangan serta membantu masyarakat muslim dari larangan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah mempunyai dua fungsi, yaitu lembaga komersial (keuangan) dan lembaga sosial (keuangan). Berdasarkan banyaknya produk keuangan syariah, lembaga keuangan syariah selain menjalankan fungsi utamanya dalam bentuk uang, juga dapat menawarkan layanan terkait pembayaran seperti koperasi, asuransi, hipotek, sewa guna usaha dan kegiatan usaha lainnya.

Lembaga keuangan memiliki fungsi utama sebagai pemberi pinjaman (unit surplus) yaitu mentransfer dana pinjaman dari penabung kepada peminjam (unit deficit). Aset ini dibagi melalui pertukaran pemanfaatan aset oleh pemilik toko melalui pasar mata uang dan pasar modal. Unit yang kelebihan akan mendapat pembayaran, aset yang

dikumpulkan dari unit yang kelebihan akan diarahkan kembali ke unit yang kekurangan dan unit yang kekurangan akan membayar biaya bunga untuk landasan moneter yang menyebarkan aset tersebut (Aida, 2025).

Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) merupakan institusi keuangan perbankan yang dalam seluruh aktivitas operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan regulasi terbaru, transformasi nama dari "Perkreditan" menjadi "Perekonomian" menegaskan peran lembaga ini yang tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit, tetapi mencakup cakupan yang lebih luas dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat lokal. BPRS dirancang secara khusus untuk melayani kebutuhan masyarakat di tingkat daerah, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang belum terjangkau oleh bank umum (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Berbeda dengan bank konvensional, BPRS dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro dan tidak terlibat dalam sistem lalu lintas pembayaran secara langsung. Fokus utamanya adalah pada penghimpunan dana melalui simpanan tabungan atau investasi deposito, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil atau jual beli (Kasmir, 2014).

BUMD dan Pendapatan Asli Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan entitas bisnis yang modalnya secara keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keberadaan BUMD memiliki dimensi ganda yang unik, yaitu sebagai unit usaha yang mencari keuntungan (*profit motive*) sekaligus sebagai instrumen pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public service motive*) (Deddy, 2022).

BUMD didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ekonomi di tingkat wilayah. Berdasarkan regulasi terbaru, transformasi tata kelola BUMD diarahkan untuk lebih profesional agar mampu bersaing secara sehat, memberikan pelayanan yang bermutu, serta menjadi pilar penguatan ekonomi nasional melalui optimalisasi potensi sumber daya local (Pemerintah Daerah Republik Indonesia, 2004).

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan manifestasi dari kemandirian finansial suatu daerah dalam sistem otonomi. PAD mencakup seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, yang

dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul, 2004). PAD menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan penuh pada dana transfer dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2004).

Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengusahakan pergeseran aktivitas ekonomi dari sektor primer yang berbasis pertanian menuju sektor tersier berbasis jasa. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui perekonomian suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (Syarifuddin, 2010). Mudrajat Kuncoro (2010) juga memaparkan pendapat dari Meier yang menegaskan, bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pendapatan per-kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawahgaris kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah (Aisyah, 2026). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Peran Pembiayaan Syariah dalam Sektor Riil

Hubungan antara pembiayaan syariah dan sektor riil bersifat simbiotik dan mutlak. Dalam ekonomi syariah, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sendiri. Oleh karena itu, setiap pembiayaan

yang diberikan wajib memiliki aset dasar (*underlying asset*) yang jelas di sektor riil (Umer, 2000).

Mekanisme transmisi ini bekerja melalui dua jalur utama, yaitu 1) Jalur Jual Beli (*Natural Certainty Contracts*): Melalui akad seperti Murabahah, bank membantu pengusaha memperoleh modal kerja dalam bentuk barang, yang secara langsung mendorong aktivitas perdagangan (Zainul, 2009). 2) Jalur Bagi Hasil (*Natural Uncertainty Contracts*): Melalui akad Mudharabah atau Musyarakah, bank menjadi mitra modal dalam usaha produktif. Hal ini mendorong ekspansi bisnis di sektor riil karena bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan secara adil (Veithzal, 2010).

Sinergi ini memastikan bahwa pertumbuhan sektor keuangan syariah akan selalu diikuti oleh pertumbuhan sektor riil secara seimbang, sehingga meminimalisir risiko krisis ekonomi yang diakibatkan oleh gelembung spekulasi (*bubble economy*) (Muhammad, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penjelasan peran BPRS Bhakti Sumekar Perseroda dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sumenep berdasarkan data keuangan dan literatur pendukung. Objek penelitian ini adalah BPRS Bhakti Sumekar Perseroda sebagai lembaga keuangan syariah sekaligus Badan Usaha Milik Daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data utama diperoleh dari laporan keuangan BPRS Bhakti Sumekar tahun 2024, sedangkan data pendukung diperoleh dari buku, artikel ilmiah, regulasi, dan dokumen lain yang relevan dengan keuangan syariah, BUMD, PAD, dan pembangunan ekonomi daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi temuan, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan, seperti Dana Pihak Ketiga, pembiayaan, laba bersih, kontribusi dividen PAD, dan dana CSR. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel ringkas. Selanjutnya, data diinterpretasikan dengan menghubungkannya pada konsep lembaga keuangan syariah, BUMD, dan pembangunan ekonomi daerah. Untuk

menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data laporan keuangan, regulasi, dan literatur yang relevan.

HASIL PENELITIAN

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Perseroda secara umum memiliki 2 Peran dalam keikutsertaannya dalam membangun ekonomi Kabupaten Sumenep. *Pertama*, perannya sebagai sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang secara fungsional memberikan penekanan terhadap penghidupan sektor-sektor riil yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep. *Kedua*, perannya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara fungsional didirikan untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep. layaknya dua sisi mata uang yang saling berdampingan, Peran BPRS Bhakti Sumekar sebagai LKS dan BUMD memiliki tujuan yang sama, yakni terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Arsyad, dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Pembangunan”, ia mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln, 2010).

BPRS Bhakti Sumekar Perseroda menunjukkan performa yang solid dalam menjalankan fungsi gandanya sebagai lembaga intermediasi syariah sekaligus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keberhasilan bank dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat Sumenep yang tinggi terhadap produk perbankan syariah. Dana yang terhimpun tersebut tidak hanya dikelola secara pasif, namun dioptimalkan melalui penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif guna menstimulasi pergerakan sektor riil di tingkat lokal.

Lebih lanjut, efisiensi operasional dan manajemen risiko yang baik tercermin dari perolehan laba bersih yang positif. Sebagai BUMD, capaian laba ini memiliki implikasi langsung terhadap kemandirian fiskal daerah melalui setoran dividen yang memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep. Di sisi lain, BPRS Bhakti Sumekar juga tetap menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan

tanggung jawab sosial melalui pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang menyasar sektor-sektor fundamental masyarakat.

Secara lebih terperinci, ringkasan capaian indikator keuangan dan makna ekonomis dari kontribusi BPRS Bhakti Sumekar selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	Nilai (Tahun 2024)	Makna Ekonomi
Dana Pihak Ketiga	Rp 829,33 miliar	Menunjukkan kemampuan penghimpunan dana
Pembiayaan	Rp 651,57 miliar	Menunjukkan peran penyaluran dana ke sektor ekonomi
Laba Bersih	Rp 11,07 miliar	Menunjukkan kinerja keuangan positif
Dividen PAD	Rp 5,59 miliar	Menunjukkan kontribusi terhadap keuangan daerah
CSR	Rp 868 juta	Menunjukkan kontribusi sosial kepada masyarakat

PEMBAHASAN

Peran BPRS Bhakti Sumekar sebagai Lembaga Keuangan Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Perseroda menjalankan mandatnya sebagai lembaga keuangan syariah dengan mengedepankan harmonisasi antara sektor keuangan dan sektor riil di Kabupaten Sumenep. Temuan penelitian yang menunjukkan angka penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 829,33 miliar bukan sekadar prestasi angka, melainkan indikator kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas sistem perbankan syariah lokal. Besarnya DPK ini memberikan basis likuiditas yang cukup bagi bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan.

Analisis terhadap penyaluran pembiayaan sebesar Rp 651,57 miliar menunjukkan peran strategis BPRS dalam menggerakkan laju ekonomi daerah. Secara teoretis, hal ini selaras dengan pendapat Janu Dewandaru (Miftah, 2012) bahwa akurasi alokasi likuiditas pada sektor produktif akan menstimulasi aktivitas produksi dan konsumsi. Di Kabupaten Sumenep, pembiayaan ini menjadi motor penggerak bagi UMKM dan sektor riil lainnya. Karena perbankan syariah menggunakan sistem berbasis aset (*asset-based system*), setiap dana yang disalurkan melalui akad *Murabahah*, *Mudharabah*, atau

Musyarakah dipastikan mengalir pada transaksi nyata. Dampak makroekonominya adalah terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas masyarakat yang secara langsung menekan angka pengangguran di daerah.

Peran BPRS Bhakti Sumekar sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPRS Bhakti Sumekar memegang tanggung jawab ganda: sebagai entitas bisnis yang mencari profit dan sebagai instrumen pembangunan daerah sesuai PERDA No. 20 Tahun 2011. Kontribusi nyata BPRS terlihat dari setoran dividen ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5,59 miliar pada tahun 2024.

Secara analisis fiskal, dividen ini sangat krusial bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Peningkatan PAD memberikan ruang gerak (fiskal) yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik secara mandiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Keberhasilan BPRS menghasilkan laba bersih Rp 11,07 miliar membuktikan bahwa pengelolaan BUMD secara profesional dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Selain kontribusi finansial melalui PAD, peran BPRS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dari penyaluran dana CSR sebesar Rp 868 juta. Secara analitis, dana CSR ini tidak hanya bersifat filantropi (bantuan sosial), tetapi merupakan investasi sosial. Alokasi untuk pendidikan dan kesehatan menciptakan modal manusia (*human capital*) yang lebih berkualitas bagi Sumenep di masa depan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ratna (2022) bahwa institusi keuangan syariah daerah memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan masyarakat yang maju, inovatif, dan bermartabat.

Meskipun memiliki kinerja yang impresif, BPRS Bhakti Sumekar tetap menghadapi tantangan dalam memperluas jangkauan layanan. Ke depannya, peningkatan variasi produk berbasis syariah menjadi kunci agar instansi ini tetap mampu melampaui dominasi pasar keuangan konvensional di industri keuangan daerah dan menjawab seluruh kebutuhan masyarakat Sumenep yang dinamis.

KESIMPULAN

BPRS Bhakti Sumekar Perseroda memiliki peran strategis yang multidimensi dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep melalui tiga pilar utama: ekonomi, fiskal daerah, dan sosial. Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS berfungsi sebagai katalisator sektor riil dengan menyalurkan pembiayaan produktif berbasis aset dan produksi. Di sisi lain, kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadikannya instrumen vital dalam memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui setoran dividen yang signifikan, yang pada gilirannya mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Secara sosial, kontribusi BPRS melalui program CSR menunjukkan bahwa institusi ini tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Implikasinya, keberhasilan BPRS dalam menyelaraskan prinsip syariah dengan misi pembangunan daerah membuktikan bahwa lembaga ini merupakan motor penggerak ekonomi yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan nilai komersial dengan pemerataan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat literatur mengenai optimalisasi peran ganda perbankan syariah milik daerah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih progresif guna memperkuat posisi BUMD berbasis syariah sebagai pilar utama ketahanan ekonomi daerah.

REFERENSI ATAU DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan STIM YKPN.
- BPRS Bhakti Sumekar. (2024). *Laporan Keuangan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Tahun 2024*. Sumenep.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chapra, Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Husen, Sharifuddin. (2011). "Pengaruh Pengeluaran Agregat Dalam Mendorong Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan Implikasinya Pada Kesejahteraan Sosial". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1.
- Kamila, Aisyah. (2016). "Pengaruh Sektor Pariwisata, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Investasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2010-2014". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPFE AMP YKPN.
- Rama, Ali. (2010). "Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Working Paper*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Ratna. (2022). "Peran Institusi Keuangan Syariah Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah". *Jurnal LARIBA*, Vol. 3, No. 2.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)*.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rumadi. (2006). "Perda Syariat Islam: Jalan Lain menuju Negara Islam?". *Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, No. 22.
- Siahaan, Toni Rico. (2012). "Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah". *Jurnal Hukum dan Humas*, Edisi 03.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Ulviani, Aida. (2025). "Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, Vol. 2, No. 1.
- Wiwoho, Jamal. (2014). "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat". *Jurnal MMH*, Jilid 43, No. 01.